

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (UNAUDITED) TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai,
Sumatera Utara 20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sei Rampah, 24 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



L. Irwan Situmorang, S.T.

NIP. 197308192006041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	13
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	27
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sei Rampah, 24 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



L. Irwan Situmorang, S.T.
NIP. 197308192006041001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sei Rampah Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.38.789.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.38.789.000 atau mencapai 128,69 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp30.142.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.214.577.000 atau mencapai 99,41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.215.859.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.252.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.4.252.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.734.000 dan Rp.3.518.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.38.789.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.216.652.390 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp.177.863.390), Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.177.863.390.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp.1.229.500, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.177.863.390, kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.182.610.890 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.3.518.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	38.789.000	35.240.000
Jumlah Pendapatan		38.789.000	35.240.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	105.067.890	84.241.283
Beban Barang dan Jasa	D.5	104.504.500	88.283.000
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	7.080.000	94.780.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		216.652.390	267.304.283
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(177.863.390)	(232.064.283)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(177.863.390)	(232.064.283)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(177.863.390)	(232.064.283)

Sei Rampah, 24 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



L. Irwan Situmorang, S.T.

NIP. 197308192006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2025
EKUITAS AWAL	E.1	(1.229.500)	(2.532.500)
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(177.863.390)	(232.064.283)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	182.610.890	233.367.283
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		4.747.500	1.303.000
EKUITAS AKHIR	E.6	3.518.000	(1.229.500)

Sel Rampah, 24 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



L. Irwan Situmorang, S.T.

NIP. 197308192006041001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2025**

URAIAN	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2025 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	30.142.000	38.789.000	128,69	35.240.000
JUMLAH PENDAPATAN		30.142.000	38.789.000	128,69	35.240.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	215.859.000	214.577.000	99,41	261.929.000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		215.859.000	214.577.000	99,41	261.929.000



Sel Rampah, 24 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

L. Irwan Situmorang, S.T.

NIP. 197308192006041001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2025

URAIAN	Catatan	2025	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Persediaan	C4	4.252.000	-
Jumlah Aset Lancar		4.252.000	-
JUMLAH ASET		4.252.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.51	734.000	1.229.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		734.000	1.229.500
JUMLAH KEWAJIBAN		734.000	1.229.500
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	3.518.000	(1.229.500)
JUMLAH EKUTAS		3.518.000	(1.229.500)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.252.000	0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. **Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya realisasi tentang Pendapatan Perpajakan. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2025

URAIAN	2025	2025	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp35.240.000

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.38.789.000 dan Rp.35.240.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 10,07 . Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah	4.150.000,00	3.840.000	8
Jumlah	4.150.000,00	3.840.000	8

Beban Pegawai Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp.105.067.890

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.105.067.890 dan Rp.84.241.283

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 24,7 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya Pagu Anggaran Persediaan Barang Konsumsi dibandingkan dengan tahun lalu. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	105.067.890	84.241.283	24,7
Jumlah Beban Persediaan	105.067.890	84.241.2837	24,7

Beban Barang dan Jasa
Rp88.283.000

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.104.504.500 dan Rp.84.283.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 23,99 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya beban bahan berupa penggandaan dan penjilidan berkas perkara. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.404.500	7.253.000	91,6
Beban Bahan	55.100.000	45.030.000	22,36
Beban Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	-
Jumlah	104.504.500	84.283.200	23,99

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak adanya beban pemeliharaan di tahun 2024 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp.7.080.000.

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.7.080.000 dan Rp.94.780.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 92,53 persen disebabkan oleh efisiensi anggaran pada beban perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	3.900.000	18.240.000	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.180.000	76.540.000	(92,53)
Jumlah	7.080.000	94.780.000	(92,53)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp..1.229.500 dan Rp.2.532.500.

Ekuitas Awal
Rp1.229.500

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.177.863.390 dan Rp.232.064.283. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Defisit LO Rp.177.863.390

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.214.577.000 dan Rp.233.367.283.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	214.577.000
Diterima dari Entitas Lain	(38.789.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	6.822.890
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	260.188.890

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp.214.577.000, sedangkan DDEL sebesar minus Rp.38.789.000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Register Transaksi Harian (RTH)	Pengadilan Tinggi Medan	0
Jumlah		0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir Rp-
1.229.500*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.- 1.229.500,00 dan Rp.-2.532.500,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berita Acara Rekonsiliasi Kas Keuangan Perkara

Pada Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2025 telah dilakukan Rekonsiliasi dengan kondisi sebagai berikut: Menurut Kas

1. Uang Tunai	:Rp.	13.406.300,00
2. Saldo Bank	:Rp.	16.197.512.740,00
3. Materai	:Rp.	0,00
Saldo Kas	:Rp.	16.210.919.040,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.789.000	38.789.000
Jumlah Pendapatan	38.789.000	38.789.000
Belanja		
Belanja Barang	214.577.000	214.577.000
Jumlah Belanja	214.577.000	214.577.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.38.789.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.38.789.000 atau mencapai 128,69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.30.142.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sei Rampah terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.38.789.000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	30.142.000	38.789.000	128,69
Jumlah	30.142.000	38.789.000	128,69

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 10,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	30.142.000	38.789.000	128,69
Jumlah	30.142.000	38.789.000	128,69

Realisasi
Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.38.789.000 dan Rp.35.240.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,07 dari TA 2024 dikarenakan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya meningkat. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	38.789.000	35.240.000	10,07
Jumlah	38.789.000	35.240.000	10,07

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.150.000	3.840.000	80,7
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	27.889.000	25.290.000	79
Jumlah	32.039.000	35.240.000	(90,83)

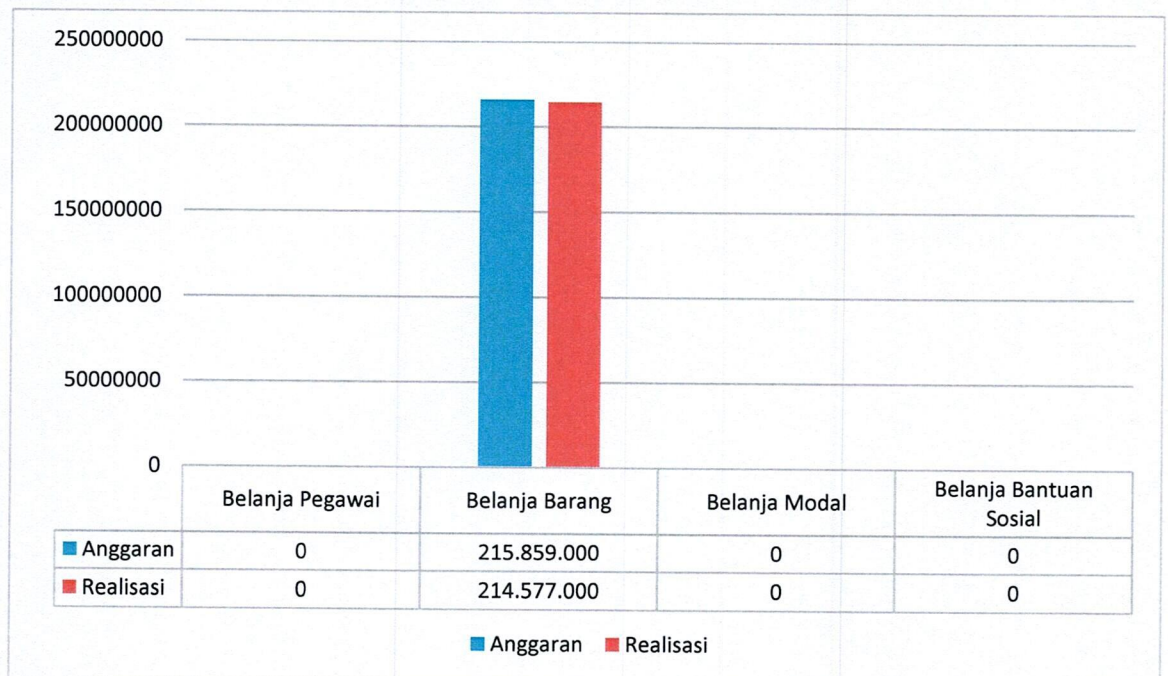
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp.214.577.000 atau 99,41 % dari anggaran belanja sebesar Rp.215.859.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Barang	215.859.000	214.577.000	99,41
Jumlah	215.859.000	214.577.000	99,41

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 18,07% .
Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang	214.577.000	261.269.000	(18,07)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	214.577.000	261.269.000	(18,07)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Rp.214.577.000

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.214.577.000 dan Rp261.929.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 18,07% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja barang non operasional berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	69.000.000	8.556.000	700
Belanja Barang Non Operasional	-	45.030.000	(100)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	102.497.000	77.563.000	24,93
Belanja Jasa	36.000.000	36.000.000	100
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.080.000	94.780.000	(92,53)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	214.577.000	261.929.000	18,07
Jumlah Belanja	214.577.000	261.929.000	(18,07)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 402013

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 2:25 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	215,859,000	214,577,000	(1,282,000)	99.41	265,760,000	261,929,000	(3,831,000)	98.56
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SEI RAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG
NIP. 197308192006041001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 2:25 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,789,000	35,240,000	3,549,000	10.071
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	38,789,000	35,240,000	3,549,000	10.071
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	38,789,000	35,240,000	3,549,000	10.071
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	105,067,890	84,241,283	20,826,607	24.723
Beban Barang dan Jasa	104,504,500	88,283,000	16,221,500	18.374
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	7,080,000	94,780,000	(87,700,000)	(92.53)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 2:25 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	216,652,390	267,304,283	(50,651,893)	(18.949)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(177,863,390)	(232,064,283)	54,200,893	(23.356)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(177,863,390)	(232,064,283)	54,200,893	(23.356)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(177,863,390)	(232,064,283)	54,200,893	(23.356)

Keterangan :

FINAL

SEI RAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG
NIP. 197308192006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
 Tgl Cetak : 25/02/26 2:26 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,252,000	0	4,252,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	4,252,000	0	4,252,000	
JUMLAH ASET	4,252,000	0	4,252,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	734,000	1,229,500	(495,500)	(40.30)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	734,000	1,229,500	(495,500)	(40.30)
JUMLAH KEWAJIBAN	734,000	1,229,500	(495,500)	(40.30)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,518,000	(1,229,500)	4,747,500	(386.13)
JUMLAH EKUITAS	3,518,000	(1,229,500)	4,747,500	(386.13)
JUMLAH EKUITAS	3,518,000	(1,229,500)	4,747,500	(386.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,252,000	0	4,252,000	

Keterangan :
 FINAL

SEI RAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG

NIP. 197308192006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 2:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,252,000	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	734,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	214,577,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	38,789,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,822,890
0.0	391111	Ekuitas	1,229,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	40,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,150,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,710,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	27,889,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,404,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,100,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,900,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,180,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	105,067,890	0
JUMLAH			260,922,890	260,922,890

Keterangan :

FINAL

SEI RAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG

NIP. 197308192006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 2:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	214,577,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	38,789,000	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	40,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,150,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,710,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	27,889,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,900,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	55,100,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	102,497,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,900,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,180,000	0
JUMLAH			253,366,000	253,366,000

Keterangan :

FINAL

SEIRAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG

197308192006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (402013) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 2:25 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	(1,229,500)	(2,532,500)	1,303,000	(51.45)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(177,863,390)	(232,064,283)	54,200,893	(23.36)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	182,610,890	233,367,283	(50,756,393)	(21.75)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,747,500	1,303,000	3,444,500	264.35
EKUITAS AKHIR	3,518,000	(1,229,500)	4,747,500	(386.13)

Keterangan :

FINAL

SEI RAMPAH, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



L. IRWAN SITUMORANG

NIP 197308192006041001

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (402013) Pengadilan Negeri Sei Rampah
 Kode dan Nama UAPPAW : (099189) Pengadilan Tinggi Medan
 Kode dan Nama E1 : (03) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
1. LRA, Neraca, LO dan LPE Face	V	Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
3. Neraca Percobaan Akrual	V	Ada
4. Neraca Percobaan Kas	V	Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V	Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi	V	Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang	V	Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah	V	Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA	V	Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	V	Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL		
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Saldo Awal Aset 2025 = Total Aset Audited 2024	V	Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2025 = Total Kewajiban Audited 2024 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671	V	Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2025 = Total Ekuitas Dana Audited 2024 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671	V	Sama
NERACA PERCOBAAN		
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		V
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak
		Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V	Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)	V	Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V	Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V	Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) (kec. Pengembalian Pendapatan)	V	Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)	V	Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang)	V	Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V	Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (untuk LK Tahunan tidak boleh ada)		V

2.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>		V	Tidak
3.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)		V	Tidak
4.	Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) <i>Cat: seharusnya 423221</i>		V	Tidak
5.	Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)		V	Tidak
6.	Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)		V	Tidak
7.	Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		V	Tidak
8.	Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		V	Tidak
9.	Adakah akun 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)		V	Tidak
Bila ada, seharusnya diralat ke akun 423951/423952/423953 (tergantung jenis belanja TAYL yang dikembalikan)				
10.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		V	Tidak
11.	Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		V	Tidak
Catatan : KL dapat menambahkan akun-akun lainnya yang tidak boleh ada				
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		V	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		V	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa</i>	V		Ya
2.	Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?	V		Ya
3.	Jika ada Akun 111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) maka ada akun 391131 (Pengesahan Hibah Langsung), atau kebalikannya. <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa</i>	V		Ya
4.	Nilai 111822 lebih kecil atau sama dengan nilai 391131?	V		Ya
Transfer Masuk dan Transfer Keluar		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah mungkin ada transfer masuk dan transfer keluar?	V		Ya/tidak
2.	Apakah seharusnya transfer masuk sama dengan transfer keluar?	V		Ya/tidak
3.	Apakah seharusnya transfer masuk lebih besar dari transfer keluar?		V	Ya/tidak
3.	Adakah pengawasan transfer keluar dan transfer masuk?	V		Ya
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		V	Ya/tidak
2.	Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?	V		Ya
3.	Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN?	V		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan		V	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		V	Tidak
3.	Adakah beban bunga		V	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		V	Tidak
5.	Adakah beban hibah		V	Tidak
6.	Adakah beban transfer		V	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		V	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ya	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		V	Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif.</i>				
9.	Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
-	Pendapatan	V		Positif
-	Beban Pegawai	V		Positif
-	Beban Persediaan	V		Positif
-	Beban Barang dan Jasa	V		Positif
-	Beban Pemeliharaan	V		Positif
-	Beban Perjalanan Dinas	V		Positif
-	Beban Barang untuk Diserahkan kpd Masyarakat	V		Positif
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	V		Positif
-	Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih	V		Pos/Neg
10.	Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
-	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	V		Positif
-	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	V		Positif

-	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	V		Positif
-	Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	V		Positif
-	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	V		Positif
-	Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	V		Positif
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
11.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan		V	
Pengecekan Antar Laporan		Ya	Tidak	Seharusnya
12.	Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?	V		Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Materai), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.</i>				
13.	Adakah beban bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?	V		Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kodekelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan akun tertentu		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah akun "Ekuitas Awal" sama dengan akun "Ekuitas Akhir" LPE Tahun lalu Audited?	V		Ada
2.	Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"		V	Tidak
3.	Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK.		V	Tidak

NERACA				
Pengecekan Persamaan Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Sama
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon	V		Sama
3.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon	V		Sama
4.	Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon	V		Sama
Pengecekan akun tertentu		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (untuk LK Tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan"		V	Tidak
TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrual		Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>				
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ada/Tidak
-	Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ada
-	Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ada
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ada/Tidak
-	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ada
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ada
-	Beban Persediaan (di LO)	V		Ada
-	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V		Ada
-	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V		Ada
4.	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ada/Tidak
-	Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ada
-	Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ada
5.	Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan		V	Ada/Tidak
-	Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)		V	Ada/Tidak
6.	Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan		V	Ada/Tidak
-	Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)		V	Ada/Tidak
7.	Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan	V		Ada/Tidak
-	Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)	V		Ada

TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	V		Sama
2. Aset Tetap	V		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	V		Sama
4. Aset Lainnya	V		Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	V		Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan SIMAK	V		Sama

Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar- Daftar Transaksi BMN

	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?	V		Sama

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		V	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		V	Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		V	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		V	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		V	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		V	Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		V	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		V	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"		V	Tidak
3 Kesamaan dengan BAR KPPN	V		Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PMK)	V		Ya
3. Adakah daftar Saldo kas di bendahara pengeluaran, Hibah Langsung dan BLU	V		Ya
4. Sudahkah menjelaskan nilai Ekuitas Awal pada Penjelasan atas pos-pos LPE	V		Ya
5. Apabila Nilai di Pos-pos LPE besar/material, sudahkah ada penjelasan yang cukup?	V		Ya

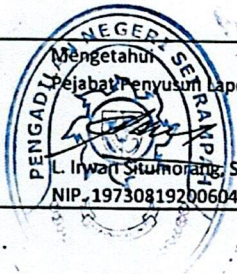
Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?		V	Ya/tidak
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?		V	Ya/tidak
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?		V	Ya/tidak
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Satker?	V		Ya
5. Apakah ADK yang dikirim ke UAPPA-W dan Eselon 1 sudah yang paling akhir?	V		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya:

- Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU (akun 525111) + selisih Belj Peg Yg Msh Hrs Dibayar
- Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA + selisih Piutang Pengembalian Perjadin + selisih Pengembalian Perjadin yang masih di Bendahara
- Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer keluar - penghapusan + Transfer Masuk + Hibah Barang + Perolehan Aset Lainnya + Koreksi



Mengetahui
Pejabat Penyusun Laporan Keuangan,

L. Inwan Situmorang, ST
NIP. 197308192006041001

Sei Rampah, 21 Februari 2025

Penelaah,

Devyanti Silitonga